

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA



PENGARUH AUDIT KINERJA TERHADAP PENERAPAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE PADA KAB. LUWU

(Studi Kasus Industri Kelapa Sawit)
Tahun ke-1 dari pencetus 1 tahun

Oleh :

Rahmawati, S.E.H.Si, AK
Anissa Rizki SE

NIDN : 0916027501
NIDN : 0806053103

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
MUHAMMADIYAH PALOPO

Juni 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : **PTINGGARUH ALUMI INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU** (Studi Kasus: Kabupaten Luwu)

Pemodal / Pelaksana : **RAHMAWATI SILMUSALAH**
Nama Lengkap : **0906027601**
NIDN :
Jabatan / Organisasi :
Program Studi : **Administrasi**
Nomor HP : **081335429082**
Email (e-mail) : **rahmawati2023@yahoo.co.id**

Anggota Panitia (2) : **ANTIKA RUSTI S.E.**
Nama Lengkap : **0906021100**
NIDN : **0906021100**
Pengantar Tugas : **Seorang Tinggi Ilmu Ekonomi (Strata 1) Jurusan**

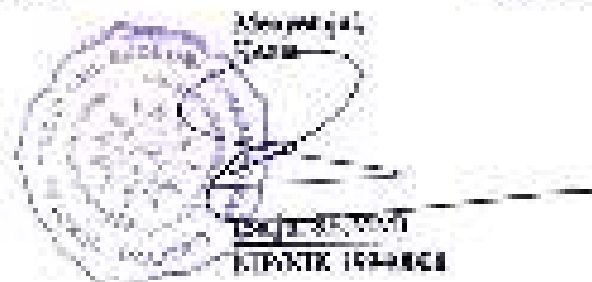
Ketua Panitia Mitra :
Mitra :
Pemangku Mitra :
Teknis Pelaksanaan : **Teknik dan Administrasi Perkantoran**
Riwayat Tahun Terakhir : **Rp. 12.000.000,00**
Riwayat Kelembagaan : **Rp. 14.500.000,00**

Mengunduh
Karya Tulis

Page 1 of 8
Karya Tulis

Dr. H. Saiful Bahri, S.P., M.Si
KIPRTEK 159-0001

RAHMAWATI SILMUSALAH
KIPRTEK 159-0001



PENGARUH AUDIT KINERJA TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA KAB. LUWI

(Studi Kasus: Kantor Inspektorat Kab. Luwu)

Habrarwati dan Andika Husli
STIK Muhammadiyah Palopo

BINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *good corporate governance* pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Auditor Internal pemerintah daerah yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Luwu.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan alat analisis regresi linear sederhana yang diolah dengan software SPSS versi 18.

Keyword: Audit Internal, Auditor Internal, *good corporate governance*

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tertutup Terhadap Penerapan Good Governance.....	5
B. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Peningkatan Efisiensi.....	6
C. Hubungan Audit Kinerja dalam Mewujudkan Good Corporate Governance oleh Auditor Internal.....	11
D. Keuangan Publik.....	12
E. Hipotesis.....	15
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	18
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Populasi dan Sampel.....	18
C. Metode Analisis Data.....	18
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
BAB 6. REKOMENDASI TAHAPAN BERIKUTNYA.....	34
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	
TAMBAHAN.....	

DAFTAR TABEL

5.1. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Keuangan.....	14
5.2. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kinerja	15
5.3. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Kepastian.....	16
5.4. Deskripsi Jawaban Variabel Audit Sistem Informasi.....	17
5.5. Deskripsi Jawaban Variabel Good Corporate governance	19
5.6. Hasil Uji Validitas Audit Keuangan.....	20
5.7. Hasil Uji Validitas Audit Kinerja.....	21
5.8. Hasil Uji Validitas Audit Kepastian	21
5.9. Hasil Uji Validitas Audit Sistem Informasi	21
5.10. Hasil Uji Validitas Good Corporate governance	22
5.11. Hasil Uji Reliabilitas.....	23
5.12. Hasil Uji Multikolinieritas	26
5.13. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	28
5.14. Koefisien Determinasi	29
5.15. Hasil Uji Parsial.....	30
5.16. Hasil Pengujian Simultan	32

DAFTAR GAMBAR

5.1. Grafik Histogram	24
5.2. Normal Probability Plot	29
5.3. Diagram Scatterplot	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang dilakukan setelah dilakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan sebagian wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Penda) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Penda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dibicarakan dalam pengalihan wewenang tersebut oleh pemerintah daerah yang meliputi dalam tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan (Pragyo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Suatu pemerintahan yang baik harus menjalankan tiga pemerintahannya secara utuh dan semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintahan tersebut dapat berpartisipasi secara aktif, jabatan pemerintahan juga harus dilaksanakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Undang-Undang Nomor (20/2002) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam fungsi pemerintahnya berdasarkan pertanggungjawaban, menurut hal ini perlu dituangkan sebagai bentuk kejelasan dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini sangat diperlukan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah serta masalahnya harus bisa dilakukan yang melibatkan manipulasi dan akuntabilitas di instansi pemerintahan mandual telah masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pertanggungjawaban sistem informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidaktransparan pengelolaan keuangan negara yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah yang saja.

Pengadanya manipulasi atau kecurangan (fraud) oleh oknum-oknum pemerintah daerah yang banyak dilakukan oleh orang-orang dalam instansi pemerintah daerah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Maraknya kasus-kasus korupsi menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap apa kalida pemerintahan yang lebih dikenal good corporate governance yang sudah long mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan good corporate governance yang

baik belum dirumuskan dalam pemerintahan daerah. Namun Pemada dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu pemerintahan, budaya dan pengalihan kinerja yang sistematis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Pemda.

Mengacu Mandorano (2005: 119) rumuslah tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemimpinan yang baik (*good corporate governance*) yaitu perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan. Pemerintahan (*gudh*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memastikan apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya standar tersebut, informasi dan hasil kinerja pemerintah daerah diarahkan kearah mana namun belum sepenuhnya mengupayakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran ran swasta dalam melakukan suatu alih-apresiasi pertanggungjawaban pemerintahan daerah melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat diadopsi kepercayaan masyarakat, maka perlu dilakukan suatu kinerja. Suatu Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap berbagai aspek yang dapat melaksanakan prestasi secara independen suatu kinerja serta mengkomunikasikan informasi Wahyu Nugroho (2005:2). Suatu Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam menganalisis dan memahami pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan suatu pertimbangan untuk pemerintahan kapribadi oleh pihak yang bertanggung jawab di tingkat lembaga Akademi Manajemen 2001: 2).

Penyederjanaan suatu kinerja ini berarti pemerintah daerah agar terdapat dan tujuannya, serta dengan kerentanan hasil pihak yang bertanggung jawab dan informasi yang diturunkan secara objektif hasilnya dilakukan oleh pemerintah serta pemerintah daerah dan hal ini diperlukan sebagai pegawai dalam pemerintah daerah. Diperkirakan merupakan masalah pemerintah daerah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat kinerja Pemda tentang penyediaan layanan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* yang baik.

Perubahan-perubahan yang terkait dengan reformasi tercapainya *good governance* salah satunya pemah dibuktikan oleh Dr. Lasy Nurfarid (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perlu adanya suatu kinerja atau audit operasional untuk pelaksanaan suatu kinerja suatu pihak yang diakui, menggunakan bahwa pelaksanaan suatu kinerja-operasional masih harus ditunjukkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja

Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan nilai kinerja/pemerintah bukan semata-mata keberanian formal tapi sudah membentaknya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam lingkungan masyarakat yang semakin.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Jette Agreain (2010) menyatakan bahwa kompetensi nilai dan independensi nilai berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemerintah dalam menjalankan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriatni dan (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaannya sepenuhnya dalam keseluruhan proses pemerintahan dan pelaksanaan seperti pemerintahan - Fasilitas, Jaminan, Penyelenggaraan, Tatalaksa, Wilayah, Administrasi, Audit, Laporan. Dalam proses penyelenggaraan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan program yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

Dalam hal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilmi (2013) menyatakan bahwa kinerja pegawai dalam rangka menjalankan *good governance* sudah berjalan baik hal ini bisa dilihat dari produktivitas yang didukung oleh keseriusan pegawai dalam mencapai kinerja dalam pelayanan yang cukup memuaskan masyarakat, kualitas pelayanan yang dimana pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan bertanggung jawab yang mampu dalam melayani seluruh-kelompok masyarakat. Namun menurut Rasmidi (2014) bahwa faktor penghambat menjalankan *good governance* diantaranya kondisi disiplin pegawai. Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Firdausi Walya Napada (2005:85) menyatakan bahwa BUKP melaksanakan audit kinerja secara independen untuk menilai ketidakhadiran atas kinerja BUKP-BUKMID secara ekonomis, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan manajemen budaya dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengefektifkan dan meningkatkan kinerja serta memberikan bimbingan dan arahan untuk peningkatan kegiatan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Melihat dari penelitian penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini peneliti akhirnya menarik kesimpulan bahwa salah satu hal yang dapat mewujudkan *good corporate governance* yaitu dilihat dari kinerja diri setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, baik kinerja dalam hal pencapaian tujuan, ketepatan dan ketepatan yang berlaku, pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan ekonomis, serta kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dan untuk mengetahui aspek kinerja pemerintah sudah baik atau belum perlu dibuktikan dengan bukti kinerja oleh pemerintah internal

perencanaan terkait aspek prinsip-prinsip yang berkaitan dengan good corporate governance lebih tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis akan menganalisis keefektifan penyelenggaraan audit kinerja untuk mewujudkan good corporate governance pada perusahaan daerah yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini khususnya dengan judul "Pengaruh Audit Kinerja terhadap penerapan Good Corporate Governance Kabupaten Luwu".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: "Pengaruh Audit Internal Kabupaten Luwu terhadap penerapan good corporate governance pemerintah daerah Kabupaten Luwu".

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance*

Akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi SAKIP sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pada dasarnya kebijakan tersebut bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik akan dapat mencapai tujuannya dalam tiga

dimensi: *Accounting* menurut Mardiyanto (2012) yaitu antara lain:

- a) *Kredit proses pemerintah*, artinya merupakan suatu langkah atau prosedur yang layak berkeadilan dan berorganisasi
- b) *Uraian kemampuan dan kewajiban*, baik secara diaktif, artinya proses pemerintah diaktifkan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pemerintah yang dibuat oleh instansi atau badan usaha serta untuk mendapatkan laba/mendapat atau berprestasi terhadap bukti-bukti tersebut
- c) *Pemertuan tingkat kesetiaan*, artinya pengantar dan tidak merupakan pernyataan dan prestasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan indikator yang telah ditetapkan
- d) *Kualitas yang telah ditetapkan*, artinya kriteria yang standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai kemampuan dapat berupa: (a) pemerintah yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, (b) anggaran yang diterima secara yang ditetapkan oleh manajemen, dan (c) prinsip akuntansi berorientasi umum (PABU) di Indonesia
- e) *Pengumpulan hasil* (akumulasi data) yang diperoleh hasil diukur secara kuantitatif dalam bentuk laporan atau *financial report*
- f) *Beralai yang berkepercayaan*, prosedur yang berkepercayaan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya penegang saham, manajemen, kreditor, calon investor, organisasi buruh, kantor pelayanan pajak dan masyarakat umum yang memiliki kepentingan publik.

Ada empat jenis audit yang dikenal (Gondaryanto, 2000) yaitu:

- 1) *Audit Keuangan* (*financial statement audit*) adalah audit terhadap laporan keuangan perusahaan atau organisasi pemerintahan yang akan menghasilkan opini pihak ketiga mengenai kesehatan, kepercayaan, dan kelengkapan laporan keuangan

tersebut. Audit keuangan utamanya dilaksanakan oleh perusahaan atau skema publik yang tidak mengeduk pada yang lain yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

- 2) Audit operasional/ audit kinerja (*operational audit*) adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metode yang ditetapkan mana organisa dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keberesntaan (JE)
- 3) Audit kepatuhan (*compliance audit*) adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- 4) Audit sistem informasi (*information system audit*), audit TI merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritas data, dapat membiayai pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien.

B. Pengaruh Audit Kinerja terhadap peningkatan efisiensi

Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendukung pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memelihara dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Depati Bidang Akuntan Negara, 2001 : 2).

Nofianti (2002) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dimensi audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang diteliti, menajukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hasil yang diperoleh pada pelaksanaan audit kinerja/operasional bukan semata-mata kebenaran formal tapi adalah manfaatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas publik dalam kerangka mewujudkan *good governance*.

Menurut Mardiasno (2004:179) Audit kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, dengan harapan dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, memastikan kesesuaian antara kinerja yang telah

diapal dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Sedangkan menurut Indra Hartono (2006:57) Audit Kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja kritis atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit.

Menurut Profesor Soemanjo Tjitraudoyo yang dikutip oleh I Gusti Agung Rai (2008:45) terdapat beberapa karakteristik dari audit kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan operasional, dengan menggunakan perbandingan dengan cara pemeriksaan oleh dokter, haruslah merupakan pemeriksaan semacam "medical check up" (pemeriksaan kesehatan), dan bukan merupakan pemeriksaan semacam "otopsi post mortem" (pemeriksaan mayat); jadi, pemeriksaan seharusnya dilaksanakan agar si pasien memperoleh petunjuk agar ia selanjutnya dapat hidup lebih sehat dan bukan sebagai pemeriksaan untuk menganalisis sebab-sebab kematian.
- b. Pemeriksaan haruslah wajar (fair), objektif dan realistik selain itu bersifat secara dinamis, konstruktif dan kreatif. Pemeriksaan pun harus dapat bertindak secara diplomatis.
- c. Pemeriksaan (atau setidaknya tim pemeriksa secara kolektif) harus mempunyai pengetahuan keterampilan dari berbagai macam bidang, seperti ekonomi, hukum, komputer, statistik, komputer, komunikasi dan sebagainya.
- d. Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandang pejabat pimpinan organisasi yang dipeliksanya selain itu pemeriksa harus benar-benar mengetahui prosedur yang dilaksanakannya, ia harus dapat mengantisipasi masalah serta cara penyelesaiannya dan memberikan gambaran tentang perbaikan-perbaikan yang dapat ditempuh dalam organisasi yang dipeliksanya.
- e. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu "early warning system" (sistem peringatan dini) agar pimpinan secara tepat pada waktunya, setidaknya tidaknya tidak terlambat dapat mengadakan tindakan-tindakan korektif yang mengarah pada perbaikan organisasinya.

Jenis Audit Kinerja

Evaluasi kinerja menurut PP 71 tahun 2010 adalah mengevaluasi kinerja kritis pelapornya, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Basis Akuntansi adalah basis akrual baik LO maupun LRA.

Menurut Marilano (2004:180) audit kinerja meliputi dua jenis, yaitu:

1. Audit Ekonomi dan Efisiensi

Ekonomi mengartikan arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan:

- a. Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.
- b. Penyebab timbulnya inefisiensi atau pemborosan yang terjadi, termasuk ketidaklengkapan sistem informasi manajemen, prosedur administratif, atau struktur organisasi.
- c. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan praktik ekonomi dan efisien.

Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

2. Audit Efektivitas Program

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk:

- a. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.
- b. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
- c. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.
- d. Apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan program.

Di Indonesia audit pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat berikap independen.

2. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektori Jenderal Departemen/LPND, dan Badan Pengawasan Daerah.

The Auditing Practice Comitte, yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practice Board, di tahun 1980, mendeskripsikan ringkasan (*summary*) tanggung jawab auditor:

- a. Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan. Auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaannya.
- b. Sistem Akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pengolahan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
- c. Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional.
- d. Pengendalian intern. Bila auditor berharap untuk untuk menanggapi kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*.
- e. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan tinjauan ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang, tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara atau *management* (pengelolaan) yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *govern* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta, dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif. Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalakan

fungsi pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, atama, dan lain-lain). *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berikut 10 prinsip yang mendasari *good governance* tersebut yaitu:

1) Partisipasi

Mendukung setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Penegakan Hukum

Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3) Transparansi

Menciptakan kepercayaan terbalik baik antara pemerintah dan masyarakat kemudian didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4) Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

5) Daya Tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.

6) Wawasan Ke Depan

Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

7) Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

8) Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengaitkan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

9) Efisiensi dan Efektivitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab.

10) Profesionalisme

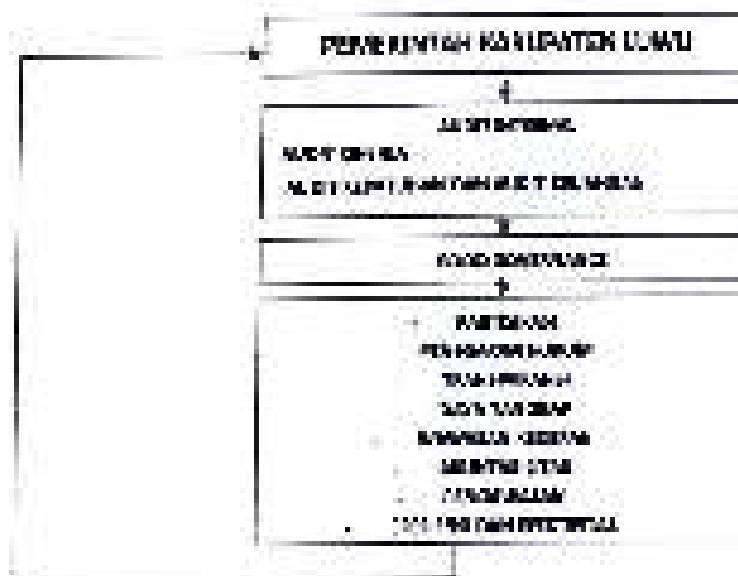
Meningkatkan kemampuan dan nilai penyelenggaraan pemerintahan agar semua mendapat pelayanan yang murah, cepat, tepat dan berkualitas yang terjangkau.

C. Hubungan Audit Kinerja dalam Menegakkan Fasal Undang-Undang Gerakan 1000 Auditor Internal

Pengendalian internal sangat penting bagi jalannya roda pemerintahan, setelah uji coba sudah adanya pengujian sebagai wawasan dan wawasan para pemertan pada kepala pemerintah daerah berdasarkan apa menurut daerah. Hal ini menyediakan prosedur dengan wajib untuk menandakan kepada pertanggung jawaban. Pengendalian internal bagi Pemda dilakukan oleh Inspektur yang biasa disebut auditor internal Pemda dapat menggunakan anggaran, dan anggaran sumber daya lainnya yang dapat agar menjadi lebih baik dan dituntutnya juga supaya ada pemertan yang baik.

Salah satu pengendalian internal yang biasa dilakukan inspektur kepala Pemda agar tercapai goal superior governance adalah dengan mengontrol, mengawasi, dan mengawasi hasil kinerja Pemda dalam mengelola pelayanan ibarat. Kegiatan pengendalian internal tersebut dilakukan oleh inspektur internal untuk menandakan kinerja Pemda yang nantinya harus dicatat dengan Audit Kinerja Nofiani (2013) dalam penelitiannya menandakan bahwa pada dasarnya audit kinerja atau audit operasional sangat dibutuhkan audit internal agar audit publik yang lebih, mengontrol semua pelaksanaan audit kinerja nasional yang harus ditugaskan hingga di semua SA/PA (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Provinsi Riau. Hal yang dipaparkan pada penelitian yang diteliti pada internal bahwa sebagai berikut. Seberapa internal yang ada di masyarakat.

D. KERANGKA PIKIR



K. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Dengan adanya nilai INTERNAL berpengaruh terhadap pelaksanaan good corporate governance Kabupaten Laras.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Subjek tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh Analis Internal terhadap pelaksanaan good corporate governance pemerintah daerah Kabupaten Laras.

BAB 4

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu peneliti mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuisioner. Dengan teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang sesuai untuk diajukan kepada para responden (Jurnal dan Sohyun, 2005)

B. Populasi dan Sampel

Menurut Lita Sekaran (2006:121,122) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal mana yang ingin peneliti investigasi, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, sampel adalah tidak atas segalanya yang diambil dari populasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pemerintah yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Laras.

C. Metode Analisa

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan alat analisis software SPSS versi 16. Pada rumus regresi linear sederhana ini menggunakan makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel

independen dan nilai variabel independen. Persamaan regresi linear sederhana ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Good Governance

X = Audit Internal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5. Variabel (X) Audit Internal

1. Deskripsi Data Variabel Audit Keuangan

Tabel 5.1
Deskripsi Jawaban Variabel variabel Keuangan

Item	STS	TS	S	S	SS	Total
1	0	0	3	7	4	14
2	0	1	0	11	2	14
3	0	0	0	10	4	14
4	0	0	1	4	7	14
Persentase	0,00	0,25	1,5	5	4,25	14

Data primer adalah diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 7% responden menjawab setuju bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang bertamtu umum, 11% responden menjawab setuju bahwa penyajian laporan keuangan telah memadai dan tepat waktu, 10% responden menjawab setuju bahwa kelengkapan laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan 4% responden menjawab setuju bahwa pemantauan terhadap laporan keuangan telah dilaksanakan oleh audit independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Jika berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada sebanyak 6% responden menjawab setuju adanya audit keuangan dan audit internal dalam perusahaan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 4,25% responden

menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu, 1,5% responden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu dan 0,25 responden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan good corporate governance Kabupaten Luwu.

2. Deskripsi Data Variabel Audit Keuangan (X₂)

Tabel 5.2
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Keuangan

Item	STS	TS	S	SS	Total
1	0	0	0	10	4
2	0	1	1	8	4
3	0	0	4	6	4
4	0	1	5	8	2
Persentase	0,00	0,5	2	8	35

Data primer sudah dikaji, 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan responden menjawab setuju yang masing-masing persentasenya berturut-turut yaitu 10% responden menjawab setuju bahwa prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan untuk organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi setiap bagian organisasi, 8% responden menjawab setuju bahwa prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas setiap bagian organisasi, 2% responden menjawab setuju bahwa terdapat metode mengorganisir dan mengelola pekerjaan, termasuk mengelola keterampilan, kerjasama, insiatif, pemberdayaan, inovasi sehingga setiap sesuai dengan apa yang dibutuhkan

organisasi lebih disosialisasikan dan diterapkan dan 0,5% responden menjawab setuju bahwa sumber telah memberlakukan output yang lebih dicapai pada periode bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, tingkat nilai-nilai sebelumnya dan unit lain pada regional yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat diinformasikan bahwa sebanyak 8% responden menjawab setuju adanya suatu strategi dari aspek manajerial dalam pencapaian good corporate governance Kabupaten Luwu, 3,5% responden menjawab setuju adanya nilai keuangannya dan aspek internal dalam pencapaian good corporate governance Kabupaten Luwu, 2% responden menjawab setuju adanya nilai keuangannya dan aspek internal dalam pencapaian good corporate governance Kabupaten Luwu dan 0,5% responden menjawab tidak setuju adanya suatu keuangannya dan aspek internal dalam pencapaian good corporate governance Kabupaten Luwu.

7. Deskripsi Data Variabel Aspek Kepatuhan (X₇)

Tabel 5.7
Deskripsi Jawaban Variabel Aspek Kepatuhan

Item	STS	TB	B	S	SS	Total
1	0	0	1	1	1	3
2	0	0	3	2	1	6
3	0	0	1	1	1	3
4	0	0	4	1	1	6
Jumlah	0,00	0,00	9	5	4	18

Data primer setelah dikali 30/4

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab semua yang masing-masing persentasenya

berturut-turut yaitu 7% responden menjawab setuju bahwa auditor internal melakukan inspeksi dan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai pada peraturan dan ketetapan yang ditetapkan, 6% responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi kesesuaian aktivitas dengan bentuk, replikasi dan standar yang berlaku, 8% responden menjawab setuju bahwa auditor internal mengevaluasi program dan kegiatan operasi apakah telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan 7% responden menjawab setuju bahwa auditor internal memberi sumbangan pada proses tata kelola dan pengendalian.

Jadi berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% responden menjawab setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu, 5% responden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu dan 2% responden menjawab netral adanya audit keuangan dari audit internal dalam penerapan *good corporate governance* Kabupaten Luwu.

4. Deskripsi Data Variabel Audit Sistem Informasi (X₄)

Tabel 3.4
Deskripsi Jawaban Variabel Audit Sistem

Item	STS	TS	N	S	SS	Total
1	0	1	2	8	3	14
2	0	3	4	5	2	14
3	1	0	3	7	3	14
4	2	0	0	8	4	14
Persentase	0,75	1	2,25	7	3	14

Data primer setelah diolah, 2014

Menyajikan tabel di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang menunjukkan persentasenya bernilai tinggi yaitu 85% responden menjawab setuju bahwa kegiatan audit internal di instansi Dinas Kabupaten Luwu adalah tetap tetapap koefisien nilai informasi dan komunikasi bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan. 1% responden menjawab setuju bahwa pelaksanaan kegiatan audit internal terhadap sistem komputer yang digunakan adalah untuk meningkatkan nilai organisasi, 7% responden menjawab setuju bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti untuk melakukan apakah sistem komputer yang digunakan mampu menjaga integritas data dan 85% responden menjawab setuju bahwa nilai terhadap sistem komputer yang digunakan dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien.

Setelah memberikan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7% responden menjawab setuju adanya audit keuangan dan audit internal dalam pelaksanaan good corporate governance Kabupaten Luwu, 3% responden menjawab sangat setuju adanya audit keuangan dan audit internal dalam pelaksanaan good corporate governance Kabupaten Luwu. 2,25% responden menjawab setuju adanya audit keuangan dan audit internal dalam pelaksanaan good corporate governance Kabupaten Luwu. 1% responden menjawab tidak setuju adanya audit keuangan dan audit internal dalam pelaksanaan good corporate governance Kabupaten Luwu dan 0,75 responden menjawab sangat tidak setuju adanya audit keuangan dan audit internal dalam pelaksanaan good corporate governance Kabupaten Luwu.

ii. Variabel (Y) Penerapan Good Corporate Governance

Tabel 1
Distribusi Jawaban Variabel Penerapan Good Corporate Governance

Item	SIK	TS	N	S	SS	Total
1	0	3	3	4	1	14
2	2	1	2	1	2	14
3	7	1	1	11	1	14
4	0	2	2	6	4	17
5	0	1	0	12	3	14
6	0	0	2	8	1	14
7	0	0	1	7	1	14
Persentase	0,25	3	1,4	7,5	3	14

Data primer setelah diolah, 2014

Informasi lain di atas menunjukkan bahwa untuk semua item pernyataan, responden menjawab setuju yang menunjukkan partisipasi berturut-turut yaitu 45% responden menjawab setuju bahwa partisipasi pemerintah Kabupaten Lingsar bersama instansi lain telah melaksanakan program secara sinergis dan partisipatif, 7% responden menjawab setuju bahwa daya layanan pemerintah Kabupaten Lingsar telah berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah terhadap approval masyarakat tanpa kecuali, 11% responden menjawab setuju bahwa masyarakat Kecamatan Kabupaten Lingsar telah menerima kepercayaan untuk melaksanakan dan menjalankan kegiatan diluar masyarakat informasi yang akurat dan terbaru, 5% responden menjawab setuju bahwa wawasan kedepan pembangunan daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan menghematkan biaya dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut

beranggung jawab terhadap kerjanya demikian, 10% responden menjawab setuju bahwa kemampuan Pemukiman Kabupaten Luwu telah melaksanakan ISM/MSM pada penyediaan layanan jalan sesuai bidang yang bersangkutan khususnya masyarakat luas, 8% responden menjawab setuju bahwa efektivitas dan efisiensi Pemukiman Kabupaten Luwu telah menjamin terdapatnya pelayanan terbaik masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan tanggung jawab lain 7% responden menjawab setuju bahwa profesionalisme Pemukiman Kabupaten Luwu telah melaksanakan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang unggul, cepat, tepat dan ramah masyarakat yang terjangkau

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7,57% responden menjawab sangat setuju bahwa pelayanan jasa di pemerintah kabupaten Kabupaten Luwu

3. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pernyataan pada kuisioner yang telah dibagikan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Untuk mengetahui validitas pernyataan dan semua variabel, maka digunakan metode uji korelasi dengan kriteria:

1. Jika $r_{ij} \geq |r_{tabel}|$ < 0,05 = valid
2. Jika $r_{ij} < |r_{tabel}|$ > 0,05 = tidak valid

1. Arah Keanggotaan

Tabel 3.6
Hasil Uji Validitas Variabel Arah Keanggotaan

Pernyataan	Correlation Coefficient	Significance	Keterangannya
Arah Keanggotaan 1	0,748	0,002	Valid

Audit Keuangan 2	0,783**	0,001	Valid
Audit Keuangan 3	0,884**	0,000	Valid
Audit Keuangan 4	0,750**	0,000	Valid

Data primer sendiri diolah, 2014

2. Audit Kinerja

Tabel 17
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Kinerja

Pernyataan	Pearson Correlation	Significance	Keterangan
Audit Kinerja 1	0,707**	0,001	Valid
Audit Kinerja 2	0,808**	0,000	Valid
Audit Kinerja 3	0,842**	0,000	Valid
Audit Kinerja 4	0,850**	0,000	Valid

Data primer sendiri diolah, 2014

3. Audit Keperolehan

Tabel 18
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Keperolehan

Pernyataan	Pearson Correlation	Significance	Keterangan
Audit Keperolehan 1	0,408**	0,019	Valid
Audit Keperolehan 2	0,832**	0,000	Valid
Audit Keperolehan 3	0,794**	0,000	Valid
Audit Keperolehan 4	0,621**	0,013	Valid

Data primer sendiri diolah, 2014

4. Audit Sistem Informasi

Tabel 19
Hasil Uji Validitas Variabel Audit Sistem Informasi

Pernyataan	Pearson Correlation	Significance	Keterangan
Audit Sistem Informasi 1	0,915**	0,000	Valid

Audit Sistem Informasi 2	0,959 ^{***}	0,000	Valid
Audit Sistem Informasi 3	0,849 ^{***}	0,000	Valid
Audit Sistem Informasi 4	0,721 ^{***}	0,004	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

3. Good Corporate Governance

Tabel 5.10
Hasil Uji Validitas variabel Good Corporate Governance

Pernyataan	Pearson Correlation	Significance	Keterangan
Good Corporate Governance 1	0,768 ^{***}	0,001	Valid
Good Corporate Governance 2	0,847 ^{***}	0,000	Valid
Good Corporate Governance 3	0,917 ^{***}	0,000	Valid
Good Corporate Governance 4	0,877 ^{***}	0,000	Valid
Good Corporate Governance 5	0,831 ^{***}	0,005	Valid
Good Corporate Governance 6	0,826 ^{***}	0,000	Valid
Good Corporate Governance 7	0,784 ^{***}	0,003	Valid

Data primer setelah diolah, 2014

Dari tabel hasil uji validitas variabel audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3), audit sistem informasi (X_4) dan variabel pernyataan good corporate governance (Y) ini bisa dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan untuk mengoperasionalkan variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk setiap pernyataan pada setiap variabel <math>< 0,05</math> maka pernyataan dinyatakan valid.

Sebelum dengan tujuan diikutinya uji validitas adalah untuk menilai seberapa besar kemampuan pernyataan dapat mengaitkan jawaban responden.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuisioner yang dibagikan kepada responden dapat dijadikan sebagai data yang layak.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat atau reliabilitas kuisioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dan untuk mengukur apakah instrumen yang dibuat hal ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali pada tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode α Cronbach. Untuk instrumen penelitian dibuktikan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,7$.

Tabel 5.11
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien α Cronbach	Kategori
Aspek Keuangan	0,715	Reliabel
Aspek Kualitas	0,890	Reliabel
Aspek Kepuasan	0,811	Reliabel
Aspek Sistem Informasi	0,858	Reliabel
Overall Cronbach Coefficient	0,834	Reliabel

Dari gambar adalah lebih 0,714

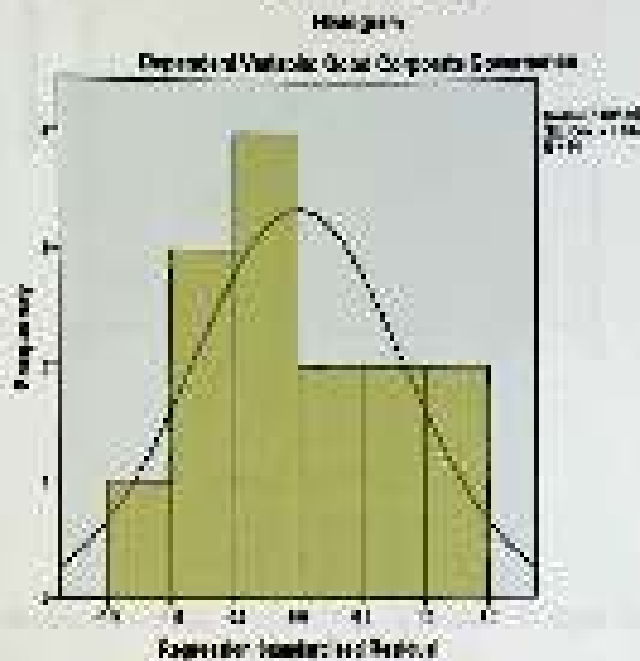
Dari hasil uji reliabilitas di atas, semua variabel yang dijabarkan sebelumnya dalam penelitian ini memiliki koefisien α Cronbach karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien α Cronbach lebih dari 0,70 sehingga dapat digunakan sebagai data yang lebih baik yang dapat diandalkan.

d. Uji Anova Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram dan kurva persedanaan P-plot.

Gambar 5.1
Grafik Histogram

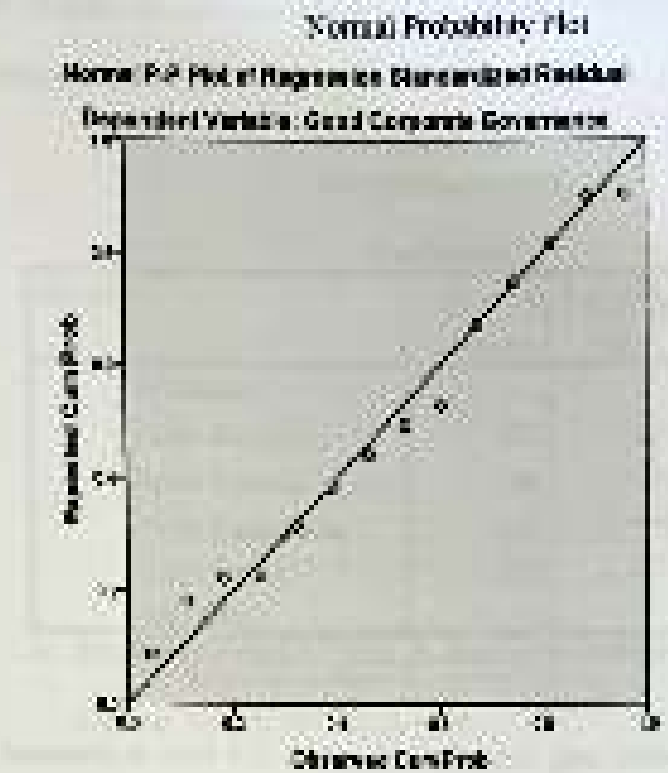


Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dengan melihat grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal, hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik mendekati simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi dari grafik histogram ini tidak terlihat sangat nyata ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Metode lain yang dapat menentukan hasil analisis adalah apakah data terdistribusi normal adalah dengan probabilitas plus.

Gambar 5.2



Sumber:

Output SPSS 21.0, 2014

Distribusi terplot di grafik P-P ini (gambar 4.1) dapat ditunjukkan bahwa perilaku titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mencari apakah ada masalah regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terdapat korelasi maka terdapat masalah pada multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk menguji apakah terdapat masalah multikolinieritas, yaitu dengan melihat tolerance value atau nilai VIF (variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance value dibawah 0,10 atau nilai

VIF kurang 10 maka variabel tersebut mempunyai pemecahan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya.

Tabel 5.12
Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Audit Keuangan	.621	1.613
Audit Kinerja	.506	1.995
Audit Kepatuhan	.513	1.559
Audit Sistem	.619	1.617
Informasi		

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

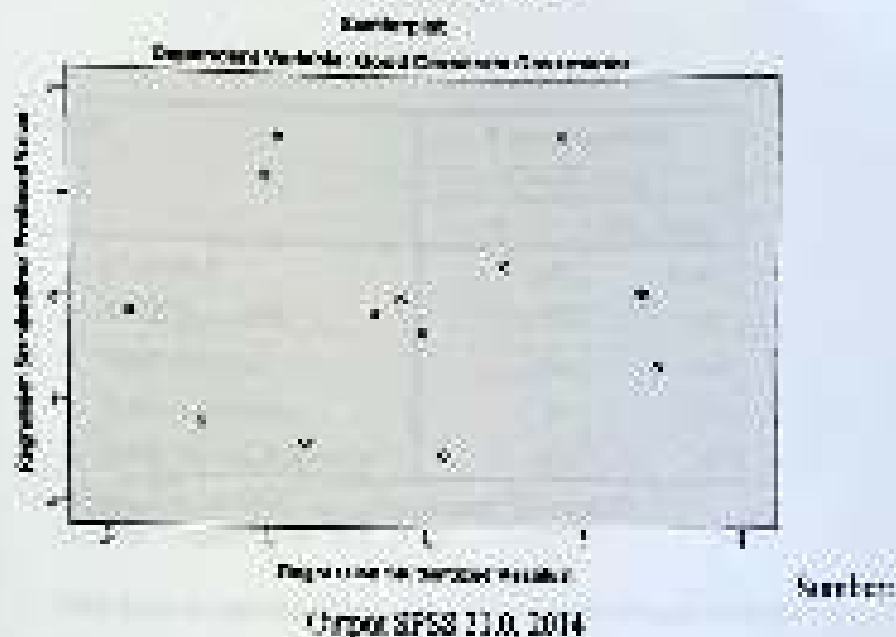
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, model regresi yang diutarakan untuk variabel independen secara umum terbebas dari multikolinearitas. Hal tersebut dapat dilihat dengan koefisien faktor (R²) masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan tolerance value > 0,10, maka dapat digunakan model regresi linear berganda terbebas dari muncul multikolinearitas dan variabel independen dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kualitas hasil kerja auditor.

6. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidakteraturan varian dan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang ketidakteraturan atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 125). Untuk menguji ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode grafik antara lain plot antara plot antara \hat{y}_i dengan e_i sebagai berikut ini:

Gambar 5.3
Diagram Scatterplot



Dari tampilan output SPSS grafik scatterplot terlihat bahwa data tersebut secara visual mampu membentuk suatu pola tertentu maka titik-titiknya mempunyai jarak dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, ini menunjukkan tidak terjadi bencana kedahsyatan.

Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dalam model regresi ini terdapat perbedaan antara dengan nilai pengamatan ke pengamatan yang lain.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji regresi Linear Berganda

Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat ditinjau melalui uji persamaan regresi berganda.

Tabel 3.11
 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	1,547	8,108 ^b
Audit Keuangan	-.573	,461
Audit Kinerja	,594	,422
Audit Kepatuhan	1,113	,559
Audit Sistem Informasi	,359	,363

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dari tabel di atas dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,547 - 0,573X_1 + 0,594X_2 + 1,113X_3 + 0,359X_4$$

Dari persamaan regresi di atas, konstanta (a) adalah sebesar 1,547 hal ini

berarti jika tidak ada perubahan variabel audit keuangan (X₁), audit kinerja (X₂), audit kepatuhan (X₃) dan audit sistem informasi (X₄) yang mempengaruhi, maka besarnya pengaruh good corporate governance Kabupaten Luwu adalah sebesar 1,547. Sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien audit keuangan (X₁) sebesar -0,573 berpengaruh negatif terhadap pengaruh good corporate governance Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit keuangan satu satuan maka variabel pengaruh good corporate governance Kabupaten Luwu adalah 0,573 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.
2. Nilai koefisien audit kinerja (X₂) adalah 0,594 berpengaruh positif terhadap pengaruh good corporate governance Kabupaten Luwu (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit kinerja satu satuan maka variabel

perubahan good corporate governance Kabupaten Liris sebesar 2,534 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.

3. Nilai koefisien audit ketidapan (β_3) sebesar 1,333 berpengaruh positif terhadap perubahan good corporate governance Kabupaten Liris (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit ketidapan satu satuan maka variabel perubahan good corporate governance Kabupaten Liris sebesar 1,333 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain tetap.

4. Nilai koefisien audit dalam informasi (β_4) sebesar 0,503 berpengaruh positif terhadap perubahan good corporate governance Kabupaten Liris (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan audit dalam informasi satu koefisien maka variabel perubahan good corporate governance Kabupaten Liris sebesar 0,503 dengan asumsi bahwa variabel independen tetap.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu audit ketidapan, audit kinerja, audit ketidapan dan audit sistem informasi terhadap perubahan good corporate governance Kabupaten Liris. Hasil koefisien determinasi dipaparkan pada tabel berikut yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Sig. F (one-tailed)
1	.889	.791	.698	.264758

a. Predictors: (Constant), Audit Sistem Informasi, Audit Kinerja, Audit Ketidapan, Audit Kinerja

b. Dependent Variable: Good Corporate Governance
Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien adjusted R square adalah sebesar 0,658 atau 65,8%. Maka disimpulkan bahwa variabel dependen yaitu *perception good corporate governance* (Eksperta Lirren (Y) dipengaruhi oleh audit keuangan (X₁), audit kinerja (X₂), audit kepatuhan (X₃) dan audit sistem informasi (X₄) adalah sebesar 69,8%. Sedangkan sisanya 30,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Angka koefisien korelasi (R) pada tabel 4.19 sebesar 0,869 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi di atas 0,5.

3. Uji Parsial (t-ji)

Pengujian regresi secara parsial (uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka ini menunjukkan bahwa variabel variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5.15
Hasil Pengujian Parsial (t-ji)

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,611	3,187		,129	,900
Audit Keuangan	-,871	,461	-,240	-,187	,245
Audit Kinerja	,554	,123	,351	1,406	,193
Audit Kepatuhan	1,331	,589	,507	2,333	,041
Audit Sistem Informasi	,971	,265	,373	1,471	,147

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

Hasil pengujian antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (persa) yang dilakukan dengan uji t (tabel 4.20) adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis kedua menyatakan bahwa audit keuangan dan audit internal berpengaruh terhadap persepsi *good corporate governance*. Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit keuangan mempunyai probabilitas signifikansi 0,245 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_2 ditolak, hal ini berarti bahwa audit keuangan dan audit internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi *good corporate governance* Kabupaten Liris.
2. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa audit keuangan dan audit internal berpengaruh terhadap persepsi *good corporate governance*. Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit keuangan mempunyai probabilitas signifikansi 0,192 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_3 ditolak, hal ini berarti bahwa audit keuangan dan audit internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi *good corporate governance* Kabupaten Liris.
3. Hipotesis keempat menyatakan bahwa audit keuangan dan audit internal berpengaruh terhadap persepsi *good corporate governance*. Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit keuangan mempunyai probabilitas signifikansi 0,041 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_4 diterima, hal ini berarti bahwa audit keuangan dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap persepsi *good corporate governance* Kabupaten Liris.

4. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa audit dengan informasi dari audit internal berpengaruh terhadap penggunaan good corporate governance dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil pengujian untuk variabel audit sistem informasi mempunyai probabilitas signifikan 0,004 karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak, hal ini berarti bahwa audit dengan informasi dari audit internal lebih mempengaruhi penggunaan signifikan terhadap penerapan good corporate governance Kabupaten Lima.

4. Pengujian Simultan (Fji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh secara serentak terhadap terdapat variabel dependen. Hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.16
Hasil Pengujian Simultan (uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	718,687	4	179,672	8,511	,004 ^b
Total	322,711	17			

a. Dependent Variable: Good Corporate Governance

b. Predictors: (Constant), Audit Sistem Informasi, Audit Keuangan, Audit Lingkungan, Audit Kinerja

Sumber: Output SPSS 21.0, 2014

Dari tabel 4.21 di atas diketahui hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung adalah 8,511 dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari α ($0,004 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara

variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerapan good corporate governance Kabupaten Lingsi. Hal ini berarti jika audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3) dan audit sistem informasi (X_4) secara bersama-sama meningkat, maka penerapan good corporate governance Kabupaten Lingsi (Y) juga meningkat. Dan sebaliknya, jika audit keuangan (X_1), audit kinerja (X_2), audit kepatuhan (X_3) dan audit sistem informasi (X_4) secara bersama-sama menurun, maka penerapan good corporate governance (Y) juga akan menurun.

HAB 6

RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA

Setelah penelitian ini, penulis akan menyampaikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah kabupaten Lingsar sehingga menjadi referensi ilmiah untuk pelaksanaan atau kelola pemerintahan yang baik khususnya pada tingkat di kabupaten Lingsar. Selain itu penulis akan bekerjasama 1980 terus melakukan penelitian-penelitian mengenai pengabdian-pengabdian lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

HAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa audi internal akan meningkatkan transparansi pemerintah县级 kabupaten Lingsar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan salah satu tuntutan dilakukannya pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik. Hal ini dapat tercapai bila pemerintah yang belum dinilai secara memadai seperti karakteristik nilai-nilainya itu sendiri, etika politik dan faktor lainnya.

Penelitian ini sesuai dengan teori (Mulya, 2001). Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Semua pemerintahan yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik. Oleh karena itu, pemerintah yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik. Oleh karena itu, pemerintah yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik. Oleh karena itu, pemerintah yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik.

Menurut Dyah Setyaningrum (2012) akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah masih dalam taraf rendah. Kelembagaan pemerintah yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik. Oleh karena itu, pemerintah yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik. Oleh karena itu, pemerintah yang baik harus menjalankan nilai-nilai tersebut secara baik.

kekurangannya yang memberikan manipulasi data akuntansi di instansi pemerintahan membuat masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pentingnya suatu informasi akuntansi. Masyarakat menyadari adanya ketidakpantasan pengelolaan kekayaan negara yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja.

Menurut Mardiana (2005: 189) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) yaitu pengewasaan, pengendalian dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya otonomi daerah, informasi dan hasil kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu belum sepenuhnya merupakan hasil yang terbaik dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan peran dari auditor dalam melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat, maka perlu dilakukan audit kinerja. Audit Kinerja merupakan suatu audit yang objektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan (Fitrianti Wahyu Nugroho, 2005:2). Audit Kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendukung pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Dagui Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

Penyelenggaraan audit kinerja instansi pemerintah daerah agar maksimal dan tujuannya sesuai dengan kebutuhan bagi pihak yang membutuhkan dan informasi yang dibutuhkan secara objektif, biasanya dilakukan oleh pemeriksa intern pemerintah daerah dalam hal ini Inspektorat sebagai pegawai intern pemerintah daerah. Inspektorat merupakan instansi pemerintah daerah yang melakukan pemeriksaan dan mengawal kinerja Penda tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good corporate governance* yang baik.

Penelitian-penelitian yang terkait dengan faktor-faktor terciptanya *good governance* salah satunya pernah dilakukan oleh Dr. Lary Nofianti (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada dasarnya audit kinerja atau audit operasional variabel pelaksanaan audit internal sektor publik yang efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kinerja/operasional masih harus ditingkatkan hampir di semua SKPD.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Latifa Agustina (2010) menyatakan bahwa kompetensi audit dan independensi audit berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*. Sedangkan menurut Supriadi dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* belum terlaksana sepenuhnya dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan - Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tegal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah. Dalam proses penyusunan RKA dan pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran yang telah disusun tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja program/kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Laili 2010. Analisis Pakar-Pakar Yang Mempengaruhi Efektivitas Audit Internal Dalam Meningkatkan Good Corporate Governance. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Angus, A. A., & Lubberke, James K. 2003. *Statistik Pendidikan* (terjemah buku I & J, hal. ke 10), Alih bahasa Yusuf, A. A. Jakarta : Penerbit Sistem Empat.
- Botari, Irma. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta
- BPKP 2001. *Prosedur Audit Kinerja*. SUPEND. Depart. Bidang Akuntan. Negara. BPKP Jakarta.
- BPKP. 2003. *Profil BPKP*. BPKP. Jakarta.
- Efendi, Mah. Taufik. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi auditor terhadap Kualitas Audit Independen Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis Magister Sains Akuntansi Universitas Djember, Tidak Diterbitkan.
- Ekmalia, Wilian dan Mardiah. 2001. *Auditing and Accounting: A Systematic Approach*. Edisi 2. McGraw-Hill, U.S.A.
- Gooding, Sanyu 2007. *Audit Sektor Informasi/Publikasi Cipta*. Mitra Wacana Media Jakarta
- Halla, Abdul & Mah Syam Khasi 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Esas*. Jakarta
- Howard, Leslie R. 2002. *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Jakarta
- Kohler, Erik L. 2010. *Accounting For dummies*. Jakarta
- Konsep Nasional Kebijakan Governance, 2008 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Wartelawang)
- Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta
- Mediana. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Publisher Yogyakarta
- Mediana. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jhe P. Dharma And. Yogyakarta
- Mulyadi 2002. *Auditing Edisi Ke 6*, Edisi 1. Penerbit Salemba Empat
- Nollan, Terry. 2012. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Mewajibkan Good Governance*. Bumi Aksara. Riau
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor III Tahun 2007. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta

- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Pokok
Mata: Jakarta.
- Prajogo, 2011. Persepsi Perencana terhadap Implementasi Standar Akuntansi Keuangan
Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Kompartemen
Akuntan Sektor Publik Ilmiah Akademi Indonesia. Vol 10 No.02. Agustus. pp. 1-
K.
- Rusman, 2013. Kinerja Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di
Kecamatan Tirta Amah Kecamatan Loa Janan Di. Skripsi Universitas
Mulyawati Medan.
- Selamatjati, 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia : Referensi, Literatur Dan
Materi-materi Pengajaran. Bandung : Elexis Adhama.
- Sekaran, Urie, 2006. Research Method For Business. Buku 1 dan 2. John Wiley. Jakarta.
Salemba Empat.
- Seyuntaningsih, Dya, 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-
RI. Skripsi Universitas Indonesia Jakarta.
- Sudjana, Agus, (2002). Analisis Perencanaan Anggaran (Dasar-Dasar Akuntan Publik
KPM 1 edisi 1. Jakarta . Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia Jakarta.
- Supriadi, Sukmanas, Realisasi 2012. Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan
Bagian-Bagian Perencanaan Pembangunan Tiga Tahap Wilayah Administrasi
Akar Daerah Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuala
Baya. Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak. Pontianak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.
- Wahyu Nugroho, Henandito, 2005. Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja Pada RU MANDUM
Di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPPTK)
Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Universitas Semarang. Semarang.

**LAPORAN AKHIR
HIBAH KKN PPM**



**PENGOLAHAN RUMPUT LAUT KATONIK MENJADI SIRUP GARANGGANG DI
KELURAHAN SAMPODDO DAN TAKKALALLA KECAMATAN WARA SELATAN
KOTA PALOPO**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Dikik 1

**RAHMAWATI SE., M.SiAkt./NIDN. 0929127601 (Ketua Tim Pengusul)
ANDIKA RUSLI, S.E. /NIDN.0900058109 (Anggota Tim Pengusul)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
MUHAMMADIYAH PALOPO
NOVEMBER 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Ceramah di Kelurahan Sempakke Jani Tarkalala Kecamatan Wera Selatan Kota Palopo
Peneliti/Pelaksana Nama Lengkap	DAFYA WATI SE.MSI, Akt
Pangkat/Tingkat	Revisi, Tingkat II, Ekstensi Mahasiswa di Sesi Palopo
NIDN	: 090912701
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Akuntansi
Member IKIP	: 081335423762
Akreditasi (e-mail)	: damasari747@gmail.com
Anggota ID	
Nama Lengkap	: ANDIKA RUSLI Sidi
NIDN	: 090508122
Pangkat/Tingkat	: Sekolah Tinggi, II, Ekstensi Mahasiswa di Sesi Palopo
Institusi Mitra (Jika ada)	
Nama Instansi Mitra	: Kecamatan Sempakke Jani Tarkalala
Akreditasi	: Kecamatan Wera Selatan, Kota Palopo
Penanggung Jawab Tahun Pelaksanaan	: Husein bin Fathimah
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 60.000.000,00
Biaya Kelembagaan	: Rp 5.000.000,00

Mengesahkan,

Ketua STMI Sidi Muhammadiyah Palopo



(ANDI SIDI, SE.MSI)
NIDN 210001021

Kota Palopo, 11-11-2015

Ketua



(DAFYA WATI SE.MSI, Akt)
NIDN 090912701

Mengesahkan,

Ketua STMI Muhammadiyah Palopo



(ANDI SIDI, SE.MSI)
NIDN 210001021

HINGKASAN

Tujuan program KKN-PPM ini adalah memberikan *Value Added* bagi petani rumput laut sehingga mereka dapat mengolah rumput laut menjadi berbagai macam olahan makanan dan minuman. Target utama dari program KKN-PPM ini adalah memberikan motivasi dan keterampilan para petani dalam pengolahan rumput laut menjadi sirup serta pengetahuan dalam pengemasan dan pemasaran produk hasil olahan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Metode yang digunakan dalam program KKN-PPM ini yakni dengan melakukan penyuluhan sekaligus pelatihan kepada masyarakat setempat tentang pengolahan rumput laut kategori menjadi sebuah produk yakni sirup rumput laut, serta memberikan pengetahuan tentang perhitungan harga pokok produk yang siap dijual.

Kegiatan program KKN-PPM ini adalah Sosialisasi program KKN-PPM, dengan melakukan kerjasama dengan dua mitra yaitu dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat. Persiapan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan, Operationalisasi yang merupakan tahap penentu keberhasilan dari program KKN-PPM, serta Monitoring dan evaluasi program untuk menjamin keberlanjutan dan pengembangan dari program KKN-PPM ini. Berbagai kegiatan telah terlaksana dalam kegiatan ini. Rencana kegiatan yang telah dipersiapkan sebelumnya telah terlaksana berkat dukungan dan bantuan pihak civitas akademika STIE Muhammadiyah Palopo dan Koperasi Kota Palopo. Pada akhirnya sosialisasi dan pelatihan ini akan berdampak ke perekonomian masyarakat binaan.

Keywords: Pengolahan rumput laut, sirup rumput laut

PRAKARTA

Digitalisasi hasil penelitian keadinan Adab SWP, karna ada banyak di dalamnya sehingga sulit dapat menyamakan laporan kegiatan pelaksanaan KKN PPM periode Juni hingga Juli 2014 di Kota Pangasinan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan hasil ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam kegiatan KKN PPM yang telah di mulai oleh DKKH, Laporan hasil mencakup kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil Pengabdian kepada Masyarakat menjadi simpul utamanya. Terimakasihnya program KKN PPM ini tak lepas dari dukungan para pihak antara lain mahasiswa, masyarakat, dinas kesehatan, civitas akademika STIE Muhammadiyah Pangasinan, serta pihak lain yang telah mendukung kegiatan ini.

Kami menyadari kegiatan ini tidak sempurna karena ada banyak ketidaklengkapan pelaksanaan kegiatan yang telah kita dapat membantu masyarakat sekitar.

Meliputi, An Fitri Sidiq

Mohamad, SE, Ak, M.Si, CA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
PEKARTA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Potensi Unggulan & Masalah di Masyarakat.....	1
1.2 Usulan Penyelesaian Permasalahan dan Cara Pemberdayaan Masyarakat.....	2
1.3 Teknologi/Metode/Kebijakan/Konsep yang akan digunakan.....	2
1.4 Profil Kelompok Sasaran beserta Potensi/Permasalahannya.....	3
BAB 2. TARGET DAN LILARAN	4
2.1 Target dan Luas	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Periapan dan Perbekalan.....	5
3.2 Pelaksanaan.....	6
3.3 Rencana Keberlanjutan Program	7
BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	8
4.1 Kinerja Perguruan Tinggi	8
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	9
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Lampiran 1. Dokumentasi kegiatan KKN PPM	

DAFTAR ISI

- Daftar Isi
1. Daftar Isi
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Potensi Unggulan & Masalah di Masyarakat

Salah satu komoditas unggulan kota Palopo adalah rumput laut. Kecamatan Wata Selatan adalah salah satu daerah yang mata pencaharian masyarakatnya adalah petani rumput laut. Rumput laut yang biasa juga disebut garunggang oleh masyarakat Palopo merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman seperti dodol, keripik dan minuman (sirup). Masing-masing olahan memiliki keunikan pengolahan dan cita rasa. Dari sekian banyak produk yang dapat dihasilkan oleh komoditas rumput laut, yang paling berpotensi untuk diolah menjadi suatu produk yang berkualitas dan lebih mudah dalam pengolahannya yaitu sirup rumput laut. Sirup rumput laut merupakan sejenis minuman yang terbuat dari bahan baku utamanya adalah rumput laut serta campuran lain seperti gula pasir, buah sebagai perisa jeruk nipis, dan air.

Alga laut (*Eucheus sp.*) merupakan salah satu sumberdaya alam hayati Indonesia. Tambahan ini merupakan nilai ekonomis yang penting dalam industri kosmetik, pangan dan lain-lain. Rumput laut banyak diolah dalam bentuk kering setelah melalui proses penjemaran atau diolah menjadi makanan siap konsumsi, seperti dodol, manisan dan minuman. Saat ini kebanyakan makanan siap konsumsi yang dijual masyarakat adalah minuman dari buah, tetapi untuk minuman dari rumput laut jarang ditemui di lingkungan masyarakat (Narasanto, 2004).

Kandungan dietary fiber dan nutrisinya bermanfaat sebagai antioksidan, antimutagenic, anti koagulan, anti tumor, dan metabolisme lipid. Rumput laut juga sebagai sumber koenzim alami yang terbaik (Zada, 2009). Kandungan serat (dietary fiber) pada rumput laut bersifat untuk menggerakkan dan memperlancar proses metabolisme tubuh, sehingga sangat baik dikonsumsi penderita obesitas. Karbohidratnya juga sangat dikawatirkan, sehingga anda merasa kenyang lebih lama tanpa takut kegemukan (Anonim, 2010).

Unit usaha yang mengolah rumput laut menjadi suatu produk masih sangat jarang di kota Palopo khususnya kecamatan Wata Selatan yang belum ada usaha pengolahan rumput laut secara langsung menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat padahal yang berpotensi mendirikan usaha rumput laut adalah kecamatan Wata Selatan karena mayoritas masyarakatnya adalah petani rumput laut.

Pada dasarnya para petani rumput laut kering sangat sedikit penerapannya karena harganya yang mahal, lebih mahal daripada yang telah kita lihat pada foto di atas. Kita bisa melihat bahwa ini akan menimbulkan nilai tambah kepada para petani serta meningkatkan penghasilan mereka.

Hasil olahan rumput laut diusahakan dalam hal ini adalah rumput laut kering bisa menjadi salah satu alternatif olahan yang dapat di jual oleh masyarakat. Hal ini di karenakan peminatnya rumput laut dan bahan dasar yang dibutuhkan juga tidak sulit diperoleh.

g. **Uraian Pelaksanaan Perencanaan dan Cara Pembedayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti KKN-PPM di komunitas Desa Satrio maka dapat disimpulkan dan diuraikan sebagai pokok permasalahan diuraikan:

1. Rumput laut hanya di tanam, panen dan hasil penerapannya tergolong sedikit tetapi tidak dijual sebagai menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat karena prosesnya tidak memperhatikan rumput laut
2. Masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat mengenai cara mengolah rumput laut karena menjadi suatu produk lainnya yang dapat dijual.
3. Selain itu belum ada unit usaha yang mengolah rumput laut menjadi suatu produk selain rumput laut.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas, maka strategi yang dapat diterapkan untuk pemaksimalan masalah tersebut yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dengan cara melakukan penyuluhan sebagai pelatihan, seperti juga seperti rumput laut yang penyuluhan rumput laut sangat mengenai tentang produk yaitu rumput laut. Penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan oleh kelompok pemuda KKN-PPM dengan dua mitra yaitu dinas Koperasi dan Pangan dan Badan Kesehatan Pangan dan Bergizi dan Bergizi Desa Pangro
2. Melakukan cara unit usaha yang mengolah rumput laut menjadi rumput laut kering dan memasarkan produknya melalui pemasaran pemasaran mandiri.

c. **Teknologi/ Metode/ Kebijakan/ Keunggulan yang akan digunakan**

Kegiatan ini akan dilakukan dengan dua mitra yaitu dinas Koperasi dan Pangan Kesehatan Pangan dan Bergizi dan Badan Kesehatan Pangan dan Bergizi dan Bergizi Desa Pangro untuk dapat meningkatkan pengetahuan dalam pemasaran masyarakat. Selain itu

menyebutkan Sasaran dan Waktu Selain itu juga para peternak sebagai kelompok masyarakat dilibatkan dan dibentangkan dalam kegiatan ini.

Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pengujian, wawancara, serta kearifan lokal dari masyarakat setempat (triba lokal) dalam pembuatan pupuk dari limbah kotoran.

B. Profil Kelompok Sosial beserta Patensi/Pemusalahannya

Tabel 1. Profil Kelompok sosial KKN HP4 beserta petensi dan pemusalahannya.

No	Nama	Kelembagaan	
		1	2
1.	Kelompok Ternak	Sampodde	Takkalala
2.	RT/RTW	T. Parangi	Jl. Hirs Kombas
3.	Tempat ternak	2011	2011
4.	Waktu	Jalan	Dura
5.	Jumlah Anggota	5	8
6.	Kelemb. Lokal	Petani/peternak	Petani/peternak
7.	Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan Sosial Struktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ternak 2. Peternak tidak dapat hasil panen rumput laut menjadi sangat baik 3. Metode tidak dapat sangat tinggi untuk menyebarkan usaha dalam rumput laut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan Wac. Sosial merupakan salah satu faktor pengaruh rumput laut 2. Peternak hanya untuk hasil dalam rumput laut menjadi sangat baik 3. Metode tidak dapat sangat tinggi untuk menyebarkan usaha
8.	Pemusalahannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keterampilan masyarakat dalam melakukan rumput laut. 2. Kurangnya tenaga manajemen produksi dan pemasaran produk masih sangat kurang. 3. Tidak adanya informasi untuk menyebarkan usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya keterampilan masyarakat dalam melakukan rumput laut. 2. Kurangnya tenaga manajemen produksi dan pemasaran produk masih sangat kurang. 3. Tidak adanya informasi untuk menyebarkan usaha.

BAB 3 TARGET DAN LUARAN

a. Target dan Luaran

KKN-PPM merupakan program yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang di rasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga program-program yang di lakukan dalam proses KKN-PPM dapat memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat setempat karena di mana dari berbagai program yang di laksanakan adalah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Ada beberapa luaran yang dihasilkan dari program KKN-PPM yaitu mendirikan dan mengembangkan salah satu unit usaha yang mengolah rumput laut secara langsung menjadi suatu produk yaitu usaha siap rumput laut dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Untuk keberlangsungan unit usaha tersebut maka produk yang dihasilkan diperkenalkan ke pasar dengan pemberian label dan kemasan yang menarik dilengkapi dengan kelayakan konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selain luaran diatas, program KKN ini diharapkan dapat memberi dampak terhadap masyarakat. Diantaranya adalah:

1. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship bagi masyarakat
2. Peningkatan pengetahuan tentang pengolahan hasil pertanian secara langsung menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat
3. Memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat secara permanen dan berkelanjutan.
4. Memberikan pengetahuan tentang perhitungan harga pokok produk yang siap dijual

BAB I METODE PELAKSANAAN

A. Persiapan dan Pembekalan

Demikian peserta yang tinggal dan masyarakat sudah peserta KKN-PPM melakukan observasi maka disini yang di berikan dalam program KKN-PPM ini yaitu pelatihan dan pengembangan diri esha. Program KKN-PPM yang dilaksanakan ini merupakan pelatihan dan sosialisasi yaitu ini cara pembuatan rumput laut yang berguna menjadi siap rumput laut yang teknikal siswa pengaplikasiannya dan bisa cara sederhana berjualan makanan padat dan energi perjuala. Siap Rumput Laut Ampas bisa menjadi rumput laut menjadi siap rumput laut yaitu.

Alat dan Bahan

- Kumpul air masak dengan umur 1-2 hari
- Gula pasir
- Botol sebagai pembungkusan
- Lemak nipis
- Koper sach
- Pengering (Kain Putih)

Air

- Kumpul

Cara Membuat

- Buatlah kumpul laut dengan kopor um kumpul menggunakan agar bromo hijau
- Kumpul laut jarak air pialaan dan tiranya jangan kumpul jadi lagi yang masih agar tidak pekat
- Blender kumpul laut
- Blender kumpul laut yang sudah ditiriskan dan sudah menggunakan bromo dan kumpul laut jarak ini jadi kumpul
- Masak kumpul laut yang sudah di blender kemudian dituang
- Kemudian kumpul laut yang sudah dituang dengan kumpul laut yang sudah dituang kedalam 2000 kemudian masukkan gula pasir sebanyak 1 Kg dengan air sebanyak 600 ml, kemudian masak hingga mengering dan gulanya kumpul
- Selesai masak kumpul laut masukkan kedalam plastik

Hal ini sangat penting karena permasalahan yang dihadapi masyarakat disebabkan karena minimnya pengetahuan dan penerapan teknik dalam proses produksi.

Pengemasan/kenangan produk perlu yang berkualitas agar kualitas produk juga bagus. Labeling adalah tampilan awal yang dilihat oleh konsumen atau calon konsumen, sehingga untuk menarik minat konsumen perlu label yang menarik.

B. Pelaksanaan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan program KKN-PPM ini adalah:

1. Sosialisasi program KKN-PPM
2. Kerjasama dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kota Palopo untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat
3. Penyajian sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan
4. Operasionalisasi yang merupakan tahap penentu keberhasilan dari program KKN-PPM
5. Monitoring dan evaluasi program untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan dari program KKN-PPM ini.

Pelaksanaan program kegiatan KKN-PPM ini terlaksana dengan baik melalui kerjasama dan partisipasi dari masyarakat serta beberapa mitra yang terlibat. Selain partisipasi sebagai kelompok sasaran atau peserta dalam pelatihan yang akan dilaksanakan dalam program KKN-PPM ini. Masyarakat dan mitra juga berpartisipasi dalam hal penyajian alat dan bahan pengolahan yang tersedia di lokasi.

Volume pekerjaan dalam bentuk Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN PPM digambarkan dalam table 2 dibawah ini :

Tabel 2. Volume pekerjaan dalam bentuk Jam Kerja Efektif Mahasiswa KKN PPM

No.	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)	Keterangan
1.	Sosialisasi program KKN-PPM	a. Sosialisasi dan Seminar Program Kerja	60 x 6 jam	
		b. Pelatihan kelompok tari	60 x 6 jam	
2.	Kerjasama dengan dua mitra yaitu dinas Koperindag dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kota Palopo	a. Undangari kelompok tari	60 x 6 jam	
		b. Penyuluhan dan persiapan praktik pengolahan tepung ketot.	60 x 12 jam	
3.	Penyajian sarana dan prasarana	a. Pembelian bahan dan Pembelian peralatan	60 x 6 jam	
		b. Penyajian tempat produksi	60 x 30 jam	
4.	Operasionalisasi	a. Pelatihan Pengolahan bersama	60 x 30 jam	

		Kepelangan	
2.	Monitoring dan Evaluasi	b. Pelatiran Penitipan Biaya Proyek	60 x 2 juta
		c. Kegiatan Pertanggung Jawaban	60 x 12 juta
		d. Evaluasi dan pelaporan	60 x 30 juta
Total Volume Kegiatan			60 x 150 9000

C. Manfaat Keberhasilan Program

Program ini merupakan bentuk pengabdian Pemerintah Tinggi kepada masyarakat dengan cara kegiatan kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan akses pendidikan tingkat lanjut bagi berkembang kemampuan serta ketrampilan yang telah di berikan sebelumnya dan membantu pengisian masyarakat secara luas. Dan jika dilaksanakan pengabdian tersebut dapat diharapkan untuk produktif dalam berbagai situasi kemasyarakatan dan lainnya.

KATA

KELAYAKAN PERCIPTAN TINGGI

4.1. Kinerja Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dapat dikatakan salah satu institusi Pendidikan tinggi yang aktif dalam pelaksanaan program pendidikan masyarakat sebagai salah satu program Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan program pendidikan masyarakat ini dibarengi satu lembaga yaitu unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasopis (STIEK) Pasopis. Program KKN-PBM ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pasopis dan mahasiswa KKN-PBM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pasopis.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan program KKN PPM seperti tujuan awal peneliti untuk membentangkan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka kesuksesan program ini. Keberhasilan kegiatan ini dilaksanakan dengan semangat dan partisipasi dari berbagai pihak yaitu sebagai berikut: STE Muhammadiyah Palopo, Masyarakat, maupun pemerintah Kota Palopo yang diwakili Dinas Kepertanahan, Adipura hasil yang dicapai dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok-kelompok pelaksana dalam rangka pelaksanaan program KKN PPM ini.
2. Bertindaknya pembentuk kelompok-kelompok masyarakat yang akan terlibat dalam rangka pelaksanaan program.
3. Bertindaknya pembina kepada kelompok masyarakat setempat karena pengalihan tanggung jawab untuk menjadi sangat nyata dalam pelaksanaan. Berdasarkan dari program ini diketahui atau terjalarnya program KKN-PPM dengan dinas kesehatan, kota Palopo. Pelaksanaan ini disertai dengan kebijakan pemerintah sia di tingkat lokal.
4. Persentiasan unit kerja di kelompok masyarakat dengan meniadakan pembatasan membuat simpul simpul ini serta pemisahan barang, kita orang webis plastik dan toilet, serta mesin yang digunakan. Hal ini pengalihan siswa simpul ini agar mereka bisa bekerja.
5. Persentiasan apreas keramaian KKN-PPM dan pelaksanaan Monitoring internal.
6. Monitoring dan evaluasi selanjutnya akan yang dilakukan oleh data literatur atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
7. Pelaksanaan publikasi dan monitoring internal.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

Program KKN PIM menjadi wadah dalam rangka mewujudkan tri darma perguruan tinggi. Dimana perguruan tinggi dapat menjadi mitra bagi masyarakat. Salah satu fungsinya adalah membantu masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui program ini tim serta kelompok mahasiswa memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka pengelohan/ pembuatan sirup rumput laut.

Terbuktanya program ini tentunya dengan bantuan dari pihak koperindag dan perguruan tinggi yang mendukung penuh. Mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya. Persiapan telah dilakukan jauh sebelumnya namun untuk pelaksanaannya dilakukan setelah perantara/organisasi kemdik dengan dilia' pihak kopertis yakni pada Juni 2015. Pada laporan akhir ini telah tercapai beberapa hasil yang sebelumnya dijelaskan di bab 5. Pihak kami mengharapkan dengan tercapainya beberapa kegiatan tersebut dapat member manfaat bagi masyarakat, mahasiswa maupun bagi peneliti sendiri.

Adapun saran yang di bisa diberikan yakni dengan program-program selanjutnya dapat di kembangkan sesuatu yang tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat atau yang langsung menyentuh ke masyarakat setempat khususnya untuk skema pengabdian. Dengan begitu fungsi Perguruan Tinggi bukan hanya sebagai akademik namun juga berguna dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

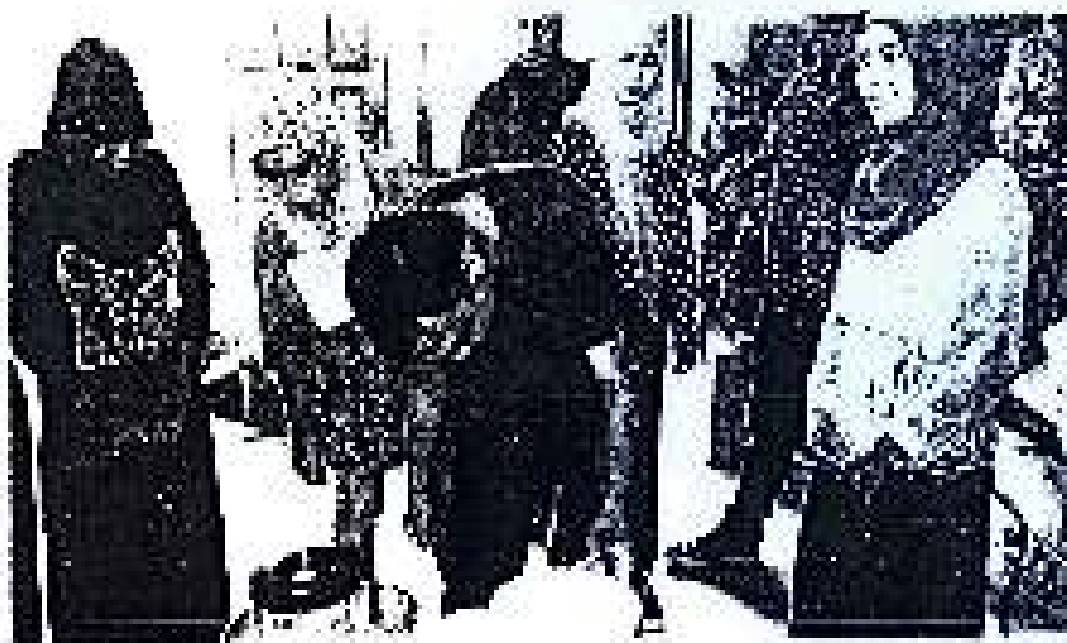
- Lili, S., Zetris A. Sulaimi, dan Anggadireja T. (2012). *Manajemen Pengolahan Sampah*. Asas Ilmu Penelitian. Jakarta: ITIP.
- Wibisono, Lilius, Ed. (1997). *Perencanaan Kawasan Lasi (Wasteland Control) Mewahid 200500*. Melayan Jember, 2012, Jurnal Penelitian, Pontianak.
- Anggadireja T., Zetris A., Purwati, H., dan Lili, S. (2012). *Sampah Laut*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Harjati H. dan Sunardi, E. (1999). *Statistika, Pengolahan dan Presentasi Rasio dan* Jember: Penerbit Swadaya. Hal. 41
- Wibisono (1997). *Teknik Pengolahan Kawasan Lasi*. Jakarta: Pusaka Sinar. (online)
- Arifin. <http://www.sampah.com> di akses tanggal 14 April 2014
- Arifin. <http://www.pelipokota.com> di akses tanggal 13 April 2014

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan KKS PPM





SYRUP
GARANGGANG™
DINILAI TERBUKTI AMBADIYAH
PALANG





PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN





**2nd International Conference on Commerce, Financial Markets and
Corporate Governance (ICCFMCG-2015)
Penang, Malaysia, Dec. 19-20, 2015**

Date: November 08, 2015

Rahmawati, SE, Andika Rizki, Perabawati Simasari
Accounting, STIE Muhammadiyah Palopo, Indonesia
Accounting, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Ref: ICCFMCG-15-219

Subject: Acceptance Letter

Dear Sir (s)/Madam (s)

Congratulations! We are pleased to inform you that based on peer review process your submission entitled **Effective and Efficiency Program Processing Kaselek for Support Community of Entrepreneurship** has been accepted for oral presentation at 2nd International Conference on Commerce, Financial Markets and Corporate Governance (ICCFMCG-2015). Conference will be held at Rainbow Paradise Beach Resort, Penang, Malaysia on December 19-20, 2015. On behalf of conference organizers we invite you to attend the conference and present your paper. Date and time of your session will be emailed to you approximately four weeks prior to the conference.

Please complete the following steps at your earliest.

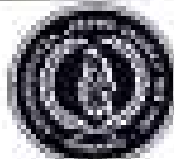
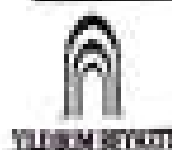
- Fill in the attached registration form and submit your registration fee.
- Each attending participant must complete a separate registration form and submit required registration fee.
- Submit your revised paper according to suggestions of the reviewers and author guidelines.

Please feel free to contact us if you have any query through email by mentioning your manuscript number, we will be happy to assist you. We are looking forward to meet you in wonderful Penang.

Sincerely Yours,



Conference Chair
Dinep Kumar M., PhD





Reviewers Report

Manuscript No: ICCFMCG-15-0119

Manuscript Title: *Effective and Efficiency Program Processing Kasepak for Support Community of Entrepreneurship*

Evaluation of the Paper: (1 = excellent) (2 = good) (3 = appropriate) (4 = average) (5 = poor)

Rationale of the Study	1
Title of the Study	1
Abstract	1
Introduction	2
Literature Review	1
Methodology	1
Results and Discussion	1
Conclusion and Recommendations	2
References	1
Technical Quality and Originality	2
Report Writing and Presentation	2

Recommendation: (Mark with ✓)

Accept without revision:

Requires minor revision:

✓

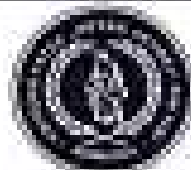
Requires moderate revision:

Requires major revision:

Reject submission:

Additional Comments (if any):

- Provide complete references at the end only for missing text citation
- Formatting text citation should be given properly in APA style
- Accepted paper should be formatted using single space, font Cambria, font size 11 and maximum 10-12 single space pages in single column.



Effective and Efficiency Program Processing Kacang for Support Community of Entrepreneurship

Rahmawati, SE, MSl, AkCA
Accounting Muhammadiyah STIE Palopo
Indonesia
rahmawati345@yahoo.co.id
Andika Rush, SE
Accounting Muhammadiyah STIE Palopo
Ehy:kar50@gmail.com

Abstract

KKN PPM program goal is to provide Value Added for seaweed farmers so that they can process the seaweed into a wide variety of processed foods and beverages. Specific target of KKN PPM program is to provide the maximum and skills in seaweed processing into syrup and knowledge in the packaging and sale of processed products so as to increase the income of local communities. The method used in the KKN PPM program is/achieved by conducting outreach to the local community as well training on seaweed processing kacang into a syrup that is a product of seaweed, as well as providing knowledge on the calculation of cost of the product ready for sale.

Program activities KKN-PPM is a socialization program KKN-PPM, in cooperation with two partners, namely services Koperasi to conduct counseling and training to the community. Preparatory facilities and infrastructure that support the implementation of activities. Operationalization which is the stage of determining the course of the program KKN PPM, as well as the monitoring and evaluation of programs to ensure the sustainability and development of KKN-PPM program. Various activities have been carried out in this activity, plan activities that had been prepared previously have possible through the support and help of the community as well as STIE Muhammadiyah and Koperasi Palopo Palopo. In the end, socialization and training will have an impact to the community economy built.

Keywords: Processing, seaweed, kacang, syrup

1. INTRODUCTION

One of the leading commodity Palopo town is seaweed. South Wera Sub-district is one of the areas of livelihood people are farmers. Rumpu sea grass is usually called by the public kacang Palopo is one of the agricultural products that can be processed into a variety of foods and beverages such as dish, chips and drinks (syrup). Each of these has unique processing and refined taste. Of the many products that can be produced by seaweed commodities, the most potential to be processed into a quality product and a more easily in seaweed processing syrup. Syrup seaweed is a kind of drink made from primary raw materials are seaweed and other mixtures such as sugar, fruit as a lemon flavoring, and water.

Marine algae (*Fucoxantina* sp.) is one of the natural resources of Indonesia. This plant has an important economic value in the cosmetics industry, food and others. Seaweed many processed in dry form after going through the drying process or processed into food ready for consumption, such as: duck, sweets and drinks. Currently most sold food ready for consumption society is the fruit juice drink, but to drink from seaweed rarely encountered within the community (Nursanto, 2004).

The content of dietary fiber and beneficial nutrients as an antioxidant, antimutagenic, anti-coagulant, anti-tumor, and metabolic sea lipid output well as the best natural source of iodine (Fada, 2005). The fiber content (dietary fiber) in seaweed are for filling and strength the body's metabolic processes, so it is very well taken those. Carbohydrates also difficult to digest, so you feel full longer without fear of obesity and the good fiber in seaweed. Liu Ting (2003), Yang Yong Song (2015)

Business units to process seaweed into a product is still very rare in the town of Palopo especially Wana South that there has been no attempt seaweed processing directly into a product which is more useful when a potentially establish seaweed business is districts Wana South because the majority of the people are farmers seaweed (Anggahredja, 7 2019).

Generally of the seaweed farmers directly sell their produce directly either wet or dry but if processed further this effort will provide added value to farmers and increase their income.

Expanding to Demand

One explanation for the jump in prices is that traders were simply responding to demand from China, with its boost from the Olympics, while supplies from some sources – notably the Philippines – weren't available because of bad weather. Another theory is that Chinese food ingredient companies were engaged in a vicious turf war, with some colluding to drive up the cost of seaweed in order to knock competitors out of the business. A. Chernus (1978). Yet another view is that speculators and traders saw the midyear surge in crude oil and other commodity prices and figured seaweed would follow, so they filled their warehouses in hopes prices would keep climbing. Whatever the reason, high prices emboldened farmers to rush immature or low quality seaweed to market, flooding buyers with too much supply. Many farmers say greedy traders made matters worse by mixing raw seaweed with sand or cement to increase the product's weight, and hence its selling price, upsetting buyers in China and sending

prices into a death spiral. Such, if not, and other circumstances that it seems to the
agreed and must be raised to get the mortgage on

Process of seaweed, especially in the use seaweed synp law, is one alternative
production that can be made by the community, it is in because to make it quite
expensive materials required is also difficult to obtain

Based on observations made by participants KEM-PPM in the field of South
Wales can be concluded that agreed upon some basic business terms:

1. Seaweed only in plastic, freezing and crop will directly sold but not
processed directly into a product with a more complex particular seaweed
a processed litowrap
2. There is still a lot of seaweed held by local communities, about how to
directly seaweed would into a product, especially synp seaweed
3. In addition, there is no business and business seaweed into a product that
is a synp seaweed

Based on some of the above problems, it is an established strategy for the
development of the product, namely:

1. To analyze local communities by conducting a field surveying as well
training on seaweed processing formula from a product that is a synp
seaweed, therefore the training is conducted in cooperation with the
participants KEM-PPM with the partners, namely with the training Filipa
Lawa and the final survey and surveying for product.
2. Set up one business unit to process seaweed into synp seaweed, as well as
conducting training in marketing management product

KEM-PPM is a program that is implemented to provide benefits to be directly
to the people so that the program will be understood in the process of KEM-PPM
can contribute to local community because of which of the various programs are
top oriented to be appropriate program with the needs of local communities.

From an several outcomes resulting from KEM-PPM program that is an impact
locally a business unit that processes the seaweed directly into a product, that is a
synp seaweed business with the use of insurance, by means of local
communities for the sustainability of the business unit then the resulting product
was introduced to the market with labeling and packaging are attractive presented
with the facilities of consumption of Food and Drug Methodology Agency.

In addition, with these outcomes, several local community is reported to have
an important role, among others are:

1. Enter the field of entrepreneurship locally

2. Increased knowledge about the processing of agricultural products seaweed directly into a product which is more useful
3. Provide benefits to the economic development of society as a permanent and sustainable.
4. Provide knowledge about calculating the cost of a product ready for sale.

2. METHOD OF EXECUTION

The method applied is to provide counseling, knowledge and skills in seaweed processing both in manufacturing and in economic aspects

A. Preparation and Debriefing

Based on the problems faced by the community after KKN-PPM participant observation, the solution offered in KKN PPM program is the establishment and development of business units. KKN PPM program implemented is the application of science, namely the procedures peangdahn seaweed directly into syrup seaweed and technological processes, packing / packaging and labeling as well as development of product marketing management and sales strategies Seaweed syrup. As for how the seaweed processing into syrup seaweed, namely:

Tools and materials:

- Seaweed ketanok with age > 45 days - -Wak
- Sugar - Pan
- Fruit as flavorings (Orange)
- Lime
- Lime betel
- Filter (Fabric White)
- Water
- Stove
- How to make:
 - Soak seaweed with chalk sirih to inflate so the smell is gone.
 - Peel the oranges and separate from the seeds-not to get the seeds to avoid the bitter taste
 - Blender citrus fruit
 - Blender seaweed-soaked and expands terdah then enter lime juice to taste
 - Ripen oranges that are already in the blender and then filtered
 - Cook the seaweed that has been in the blender and then filtered
 - Combine the citrus fruit that has been filtered by seaweed that has filtered into the pot and then enter the sugar as much as 1 kg with 600 ml. of water. Then cook until cooked and sugar dissolves
 - After cooking strain the back and enter it into the bottle.

This is very important because the problems faced by the public due to lack of knowledge and equipment to support the production process.

Packing / packaging products need to be qualified in order that the product quality is also higher. Labeling initial display seen by consumers or potential consumers, so as to attract consumers need an attractive label. For processing of seaweed, most important for increasing value added for seaweed and give profit for entrepreneurship (Purbawa, Lugas, 2012).

II. Implementation

The processes undertaken in the implementation of KKN PPM program are:

1. Socialization program KKN-PPM
2. Cooperation with two parties, namely Koperasi department and the Food Security and Gardens Taloko town to conduct counseling and training to the community
3. Preparation of facilities and infrastructure that supports the implementation of activities
4. The operation of which is a determinant of the success of the program stages KKN-PPM
5. Monitoring and evaluation of programs to ensure the sustainability and development of KKN PPM program.

Implementation of KKN PPM activities program is implemented through the cooperation and participation of the community and some of the partners involved. In addition to participate as a large group of participants in a training program that will be implemented in the KKN-PPM Communities and partners also participated in the preparation of tools and materials available pengabdianyang location.

3. RESULTS AND DISCUSSION

KKN PPM program implementation as the initial goal of researchers to empower people to improve their economy. Cooperation with communities and partners is there in order to smooth this program some activity has been implemented with the help and participation of various parties, namely the community Muhammadiyah STIC Taloko, community and government Taloko representasi Koperasi. The results achieved in this program include:

1. The formation of student groups in the framework of the implementation of KKN PPM program.
2. Implementation of the establishment of the group - a group of people who will be trained in the implementation of the program
3. Implementation of training to local community groups about seaweed processing into a product that is a group seaweed Counseling and training

Participants was provided in cooperation with the SKN PPM service. Koperindo Group will be implemented by training and

4. The establishment of business units in communities with many various equipment in making group around and other supporting equipment such as plastic containers and bottles as well as machines that assist in the packaging of products and others.
5. SKN PPM progress report creation and implementation of the Internal Koperasi.
6. Sustainability evaluation of the continuation of the work done by the partners of the training that has been given previously.
7. Preparation of all indicators and external evaluation.

1. CONCLUSION

SKN PPM program was the partner in order to reduce the ill disease village. When quarantine can be paid for benefits its functions is to help the community in order to improve the security in response in economy. Through this program rural and urban areas provide training and knowledge in order to increase / group workers.

Implementation of the program of course with the help of the Koperindo and program daily support through their preparation to implementation. Preparation has been done since early but for the implementation is done after aligning the contract with the Higher Education / SKN as the partner in (see 20.5). The results are it has already achieved some results previously described in chapter 5. The program we need for achievement of this action is not for a number benefit, locally, students and for the partner linked.

Suggestion that could be given that with future programs can be developed something that serves a positive impact on society in the street level to the local community, especially to start develop a number of functions not only as a students, but also as a community.

Reference

Aggadijuna, T., Zam, A., Fawzan, H. dan, dkk. (2010). *Survey dan Status Kesehatan Masyarakat*.
A. Gunawan, (2011). *Manajemen dan Efektivitas Usaha Kecil dan Menengah* (Jurnal).
L. (2016). *Case Planning Model of Sustainable Ecology Environmental Management*.
in *Wahana*, 190.

